

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

India adalah bagian kawasan di Asia yang memiliki besaran populasi terbesar di dunia. Sejarah panjang dan kompleks kawasan ini telah berkontribusi pada terbentuknya India termasuk negara yang terpisahkan Pakistan serta terbagi menjadi beberapa negara bagian.¹ Secara historikal, dinamika ini telah memicu berbagai konflik, termasuk permasalahan yang berkaitan dengan kesetaraan gender, kekerasan terhadap perempuan, serta isu-isu yang melibatkan peran dan posisi perempuan dalam masyarakat.

Meskipun India mengalami kemajuan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk pertumbuhan ekonomi yang pesat dan menjadi salah satu yang tercepat di dunia, ketimpangan gender masih menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Ketidaksetaraan gender tidak hanya berdampak pada kehidupan keluarga, tetapi juga mempengaruhi aspek sosial, ras, pernikahan, ekonomi, agama, budaya, dan kesadaran individu dalam masyarakat.

Gender merupakan konsep pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi Sosial. Hubungan sosial yang membedakan fungsi laki-

¹ Tedjo, A. K., Ramadhan, M. D., Dirgantara, M. D., & Bahari, R. A. M. (2021). Tantangan budaya dalam mewujudkan kesetaraan gender di India dan solusinya. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(1), 142.

laki dan perempuan ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilih menurut kedudukan fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.² Faktor utama yang menyebabkan ketidaksetaraan gender di India adalah nilai-nilai yang secara kuat dianut oleh masyarakat setempat. Perempuan menempati posisi penting dalam struktur keluarga, seperti sebagai anak perempuan, ibu, maupun istri.

Peran perempuan sangat penting dalam membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Prinsip ini tertanam kuat dalam budaya dan dijadikan pedoman bagi perempuan atau istri dalam menjalin hubungan yang baik dengan laki-laki atau suami. Selain itu, prinsip ini juga merupakan bagian dari kewajiban seorang istri untuk menunjukkan ketaatan kepada suaminya, baik semasa hidup maupun setelah meninggal dunia. Tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk pengabdian yang dapat memberikan kepuasan batin dan menjadi pahala yang diterima di kehidupan setelah kematian menurut ajaran agama.

Sejak lama, sistem mahar telah menjadi tradisi yang diwariskan di India, namun tradisi ini membawa dampak negatif, terutama bagi perempuan. Dalam budaya Hindu tradisional, orang tua yang ingin menikahkan putri mereka harus menyediakan mahar dalam jumlah besar. Jika keluarga mempelai perempuan tidak mampu menyediakan mahar tersebut, mereka kerap diperlakukan dengan buruk oleh pihak keluarga laki-laki, bahkan mengalami kekerasan. Hal inilah yang membuat perempuan sering dianggap sebagai beban keluarga. Masalah ini bukan

² Hasan, Z., & Parveen, G. (2020). Gender equality and empowerment of women in India: Mapping through UN sustainable development goals. *Studies in Indian Place Names*, 40(3), 1295-1303.

hanya soal kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga merupakan hambatan utama bagi terwujudnya kesetaraan gender di India. Sayangnya, isu ini lama tidak dibicarakan secara terbuka, seolah-olah dibungkam.³

UN Women memiliki tujuan utama untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan memperjuangkan hak asasi perempuan agar dapat diakui dan diterapkan secara universal. Salah satu kontribusi signifikan UN Women di India adalah menjamin keterlibatan aktif perempuan dalam ranah politik serta memberikan ruang agar mereka dapat mengemukakan pendapat dengan bebas.⁴ Pemerintah India menyadari bahwa hak perempuan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang mesti diakui dan dilindungi secara hukum. Dalam kerjasama dengan pemerintah, UN Women juga melibatkan berbagai organisasi internasional dan kelompok masyarakat sipil. Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menangani isu diskriminasi gender, sehingga dapat mengurangi ketidakadilan yang dialami perempuan di India.

Sebagai upaya mengatasi Kesetaraan Gender ini, India mengambil langkah penting melalui ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) pada 9 Juli 1993. Konvensi yang disahkan oleh PBB pada 18 Desember 1979 ini bertujuan guna melindungi hak-hak perempuan serta pelarangan terhadap seluruh jenis diskriminasi berbasis gender. Melalui

³ LATING, H. A. (2023). KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA DALAM MENGHADAPI TRADISI MAHAR (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

⁴ <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/28561/24388>

ratifikasi ini, pemerintah India berkomitmen untuk mengambil tindakan pencegahan dan memperjuangkan kesetaraan gender di negara tersebut.

Pemerintah India turut berperan dalam penerapan kebijakan yang berdampak pada kesetaraan gender di masyarakat India. Pada tahun 2016, di antara negara-negara Asia Selatan, Pakistan menempati posisi terendah dalam indeks kesetaraan gender (peringkat 144), diikuti oleh Bhutan (118), Maladewa (113), Nepal (110), India (108), Sri Lanka (84), dan Bangladesh (64), berdasarkan data Forum Ekonomi Dunia. Sementara itu, pada tahun 2016, laporan UNDP Human Development Report (HDR) menempatkan India di peringkat ke-132 dari 187 negara di dunia.⁵

PBB didirikan sebagai organisasi internasional yang memiliki tanggung jawab menangani berbagai isu global, termasuk persoalan perempuan, yang secara khusus ditangani oleh UN Women. Pada tahun 2010, Majelis Umum PBB membentuk United Nations Women atau UN Women, yakni entitas PBB yang fokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Organisasi ini mulai beroperasi pada Januari 2011, menggantikan beberapa lembaga sebelumnya yang memiliki tujuan serupa. Misi utama UN Women adalah mendukung negara-negara anggota dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui kerja sama dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam merancang undang-undang, kebijakan, program, serta layanan yang melindungi perempuan. Keberadaan UN Women juga memperkuat implementasi komitmen negara-negara yang telah

⁵ Aisy, W. F., Nurdin, I., & Nastiti, N. N. (2025). UPAYA THE UNITED NATIONS ENTITY FOR GENDER EQUALITY AND THE EMPOWERMENT OF WOMEN (UN WOMEN) DALAM

meratifikasi CEDAW, yang mewajibkan mereka untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Dalam laporan mengenai kesenjangan gender global tahun 2022, India menempati peringkat ke-135 dari 146 negara, yang mencerminkan masih rendahnya tingkat kesetaraan gender di negara tersebut. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa India mempunyai salah satu tingkat kontribusi perempuan dalam proporsi tenaga kerja aktif terendah secara global. Selain itu, menurut laporan UN Women, perempuan di India menghabiskan waktu untuk pekerjaan tak dibayar 9,8 kali lebih banyak dibandingkan laki-laki, signifikan melampaui rata-rata dunia yang hanya sebesar 2,6 kali. Dalam hal diskriminasi kesehatan berbasis gender, para ahli menyoroti bahwa hal ini berdampak buruk pada kesehatan perempuan, terlihat dari hanya 37 persen perempuan yang memiliki akses terhadap layanan medis, dibandingkan 67 persen pada laki-laki. Meski begitu, UN Women sebagai organisasi internasional terus berupaya mengatasi permasalahan ini melalui bantuan materiil, dukungan nyata, serta keterlibatan aktif dalam mempromosikan kesetaraan gender.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: “Bagaimanakah kontribusi UN Women dalam upaya mencapai kesetaraan gender di India selama periode 2016 hingga 2021?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Keadaan Sosial, Ekonomi, Politik perempuan di India
2. Memperoleh informasi mengenai peran yang dilakukan oleh UN Women dalam menangani masalah kesetaraan gender di India

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara akademis memiliki manfaat dalam memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pemerintah serta penyusunan program yang lebih efektif dalam menangani isu pelecehan seksual di India
2. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis dengan menjadi sumber referensi yang berharga bagi para peneliti lain yang tertarik mempelajari peran UN Women dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender bagi perempuan

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama ditulis oleh Rullysef mifta Kharimah dengan judul **Peran UN Women dalam penanganan diskriminasi terhadap perempuan di republik demokrasi kongo pada tahun 2015-2017.**⁶ Penulis membahas kesulitan yang dihadapi oleh perempuan pengungsi Suriah di Yordania, yang meliputi ketiadaan perlindungan hukum yang memadai, konflik dengan masyarakat lokal, serta kondisi hidup dalam kemiskinan disertai keterbatasan dalam pengembangan peran dan potensi ekonomi maupun sosial budaya. Budaya keluarga yang merugikan, praktik pernikahan anak di bawah umur, serta kondisi kehidupan yang

⁶ Rullysef Mifta Kharimah. 2019. "Peran United Nations Women Dalam Penanganan Diskriminasi Terhadap Perempuan Di Republik Demokratik Kongo Periode 2015-2017." 2019. 2019.

buruk menyebabkan perempuan menjadi sasaran pelepasan tekanan akibat frustrasi, yang selanjutnya meningkatkan risiko menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, ketidaksesuaian tempat tinggal yang layak turut menjadi faktor pemicu terjadinya pelecehan seksual dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan tersebut. Keterbatasan kemampuan pemerintah Yordania dalam menyediakan perlindungan hukum yang memadai bagi pengungsi perempuan Suriah telah mendorong berbagai pihak internasional untuk terlibat dalam penanganan persoalan yang mereka hadapi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah perbedaan penelitian adalah letak geografis daerah tersebut. Sementara kedua penelitian memiliki persamaan yaitu membahas organisasi yang berperan yaitu un women.

Penelitian kedua, jurnal oleh Galuh Artika Suri, Hamka dan Ali noerzaman dengan judul **Peran United Nations Women dalam mengatasi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan di indonesia pada tahun 2016-2017.**⁷ UN Women adalah sebuah entitas organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan sebagai kesepakatan dalam Majelis Umum PBB dengan tujuan utama mendukung dan memberdayakan perempuan di seluruh dunia. Komitmen UN Women berskala global, termasuk di wilayah Asia Tenggara, seperti Indonesia, yang menghadapi tantangan signifikan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks Indonesia, UN Women memusatkan perhatian pada Program Penguatan Penegakan Hukum serta penerapan praktik terbaik untuk memperbaiki respons dan strategi

⁷ Suri, G. A., Hamka, H., & Noerzaman, A. (2020). Peranan united nations women dalam mengatasi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia tahun 2016-2017. *Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 1(1), 30-40.

pencegahan kekerasan berbasis gender di masyarakat. Kajian ini menekankan kehadiran dan peran aktif UN Women dalam mendukung penanganan isu ini di Indonesia, melalui kampanye yang terstruktur dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran, advokasi, dan langkah-langkah penanganan kekerasan terhadap perempuan secara efektif dan berkelanjutan. Dukungan untuk mitra negara dan masyarakat sipil prioritas nasional untuk kesetaraan dan pemberdayaan gender Seorang wanita hal-hal yang dilakukan meliputi menginformasikan, mempengaruhi dan membangun mitra.

UN Women mengarahkan dan mengkoordinasi Promosi sistem PBB, terutama kesetaraan gender Tanggung jawab dan pemantauan berkala terhadap kemajuan sistem operasi dengan dukungan pemerintah untuk memberikan manfaat dalam bentuk barang Program Komisi Status Perempuan (CSW), hentikan kekerasan dan buat setiap wanita dan anak perempuan diperhitungkan Pendanaan disediakan oleh pemerintah Australia, Irlandia dan Amerika Serikat Yayasan Bill dan Melinda Gates.

Perbedaan penelitian terdahulu yang kedua ini dengan penelitian penulis berfokus pada permasalahan dimana menggunakan kekerasan terhadap perempuan sebagai topik penelitian sementara penulis menggunakan melawan kesetaraan gender Seorang wanita Selain itu, terletak pada teori yang digunakan oleh organisasi aktor internasional memainkan peran dalam instrumen, arena dan aktor independen sedangkan penulis menggunakan organisasi internasional dan penegakan, yang berfokus pada kepatuhan manajemen.

Penelitian ketiga, jurnal oleh Sabilina Mareta dengan judul **Peran UN Women dalam mempengaruhi kebijakan pemerintahan India terkait kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2011-2015.**⁸ UN Women memiliki peran penting dalam mempengaruhi pemerintah India dalam upayanya mengatasi kekerasan terhadap perempuan, terutama di tengah keterbatasan pemerintah dalam mengimplementasikan perlindungan hukum yang memadai. Sebagai contoh, pada Desember 2010, pemerintah India mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dari Pelecehan Seksual (Protection of Women from Sexual Harassment Bill atau POSH Act) sebagai upaya memberikan perlindungan hukum yang lebih tegas bagi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Namun, pelaksanaan undang-undang ini menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya pemahaman historis mengenai posisi perempuan dalam masyarakat dan lemahnya dukungan hukum bagi korban

Perbedaan penelitian terdahulu yang ketiga ini dengan penelitian penulis adalah masa studi dan peran pemerintah India dipengaruhi oleh UN Women, yang dibahas di majalah tersebut tentang pembentukan organisasi internasional, termasuk UN Women Prihatin dengan keadaan menyedihkan kekerasan terhadap perempuan, lalu turun tangan Tapi penelitian ini akan membahas bagaimana Peran UN Women dalam pemantauan dan pemantauan berkala di India dengan laporan yang dibuat dan program yang dibuat UN Women memperjuangkan persamaan hak bagi perempuan dan juga menggunakan kerangka keputusan untuk menulis

⁸ Mareta, Sabillina. 2017. "PERAN UN WOMEN DALAM MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA TERKAIT KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2011- 2015," 16.

pembuat keputusan di jurnal sedangkan penulis menggunakan teori organisasi internasional dan Penegakan yang berfokus pada pendekatan kepatuhan.

Penelitian keempat, artikel jurnal oleh Glenda Strachan, Arosha Adikaram dan Pavithra Kailasapathy dengan judul **Gender (in) Equality in South Asia: Problem, Prospect and Pathways.**⁹ Ketidaksetaraan gender di Asia Selatan muncul karena berbagai faktor yang saling terkait, termasuk ekspektasi sosial yang melekat pada perempuan, stereotip peran gender tradisional, pekerjaan yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, serta kebijakan dan praktik organisasi yang tidak mendukung kesetaraan. Hambatan utama yang dialami perempuan di kawasan ini berasal dari struktur sosial yang patriarkal dan norma budaya yang kuat, yang meliputi sistem kasta, jaringan hubungan sosial dan ekonomi, serta asumsi yang melekat dalam organisasi kerja. Artikel jurnal ini lebih menitikberatkan pada analisis faktor-faktor penyebab ketidaksetaraan gender tanpa menguraikan secara mendalam langkah-langkah penyelesaian yang dapat diterapkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menjelaskan berbagai upaya strategis yang telah dan dapat dilakukan guna mengatasi permasalahan ketidaksetaraan gender tersebut. Fokus kajian diarahkan pada identifikasi intervensi kebijakan, program-program pemberdayaan, serta prakarsa kolaboratif antara pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil yang bertujuan mendorong terciptanya kesetaraan gender secara efektif dan berkelanjutan.¹⁰

⁹ Leach, M., Mehta, L., & Prabhakaran, P. (2016). Gender equality and sustainable development: A pathways approach. The UN Women Discussion Paper, 13, 2016.

Penelitian kelima, oleh Marthadyta dengan judul **“Peran UNICEF dalam Mengatasi diskriminasi Gender di India”**¹⁰ Membahas mengenai Organisasi internasional yang memiliki peran strategis dalam membangun kemitraan dan kolaborasi dengan perusahaan multinasional (MNC), organisasi non-pemerintah (NGO), serta berbagai institusi lain sebagai bagian dari upaya terintegrasi dalam mengatasi berbagai bentuk diskriminasi yang menghambat kesetaraan gender. Dalam konteks ini, kerja sama lintas sektor tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperkuat kapasitas institusi dan memperluas jaringan advokasi, tetapi juga untuk mengimplementasikan program dan pelatihan yang secara langsung mendukung pemberdayaan perempuan serta penghapusan diskriminasi di berbagai lapisan masyarakat.

Penelitian keenam, jurnal oleh Nadya Larasati dengan judul **“Upaya Pengendalian Krisis Kesetaraan Gender di India dalam tujuan Pengentasan diskriminasi Perempuan”**¹¹ membahas tentang bagaimana konstruksi kebudayaan di India akan krisis kesetaraan gender dan upaya konkret India dalam pengentasan masalah diskriminasi perempuan tersebut. Dalam penelitian ini penulis berharap segala bentuk diskriminasi perempuan di India mendapatkan perhatian khusus dunia maupun pemerintahan India sendiri, serta berharap dengan adanya studi kasus ini memberikan wawasan terhadap dunia agar menerapkan kesetaraan gender dan berusaha mengentaskan diskriminasi

¹⁰ Marthadyta, T. (2022). Peran United Nations Children’s Fund (UNICEF) Dalam Mengatasi Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Di India Pada Tahun 2014-2018.

¹¹https://www.researchgate.net/publication/350091019_KTI_UPAYA_PENGENDALIAN_KRII_KESETARAAN_GENDER_DI_INDIA_DALAM_TUJUAN_PENGENTASAN_DISKRIMINASI_PEREMPUAN

perempuan dengan kebijakan yang mendukung kesetaraan, Hakikatnya, perempuan dan laki-laki seharusnya menikmati kesempatan dan ruang yang setara dalam berbagai aspek kehidupan.

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

NO	Judul dan nama Peneliti	Jenis penelitian dan alat analisa	Hasil
1.	Peran UN Women dalam penanganan diskriminasi terhadap perempuan di republik demokrasi kongo pada tahun 2015-2017 Oleh: Rullysef mifta kharimah	Kualitatif, Pendekatan: Neoliberal dan institusionalisme, teori international organization and implementasi	Peran organisasi internasional sangat dibutuhkan oleh negara negara yang kontradiktif Organisasi Internasional Organisasi Internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tugas PBB adalah menangani kasus-kasus diskriminasi terhadap negara rawan konflik internal, dan konflik etnis dan perang saudara terjadi di Republik Demokratik Kongo. UN Women adalah organisasi internasional PBB beroperasi secara resmi di Republik Demokratik Kongo dengan kantor negara di ibu kota, Kinshasa. dan sebuah sub-kantor di Bakau di provinsi South Kivu yang mengimplementasikan visi dan misi tersebut yaitu dalam membela hak-hak perempuan.
2.	Peran United Nations women dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan di indonesia pada tahun 2016-2017. Oleh: Galuh atika suri, hamka dan ali noer zaman	Kualitatif pendekatan: konsep teks naratif deskriptif, teori organisasi internasional	Salah satu organisasi atau program Di bawah PBB adalah UN Women. itu adalah Organisasi PBB didedikasikan untuk ini Kesetaraan dan pemberdayaan gender Seorang wanita Tujuan ini tentu konsisten Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Kelima yaitu terwujudnya kesetaraan gender atau kesetaraan gender. Dalam mencapai tujuan Saat ini, UN Women juga menjalin kerja sama pemerintah dan tentunya masyarakat sipil dalam undang-undang perencanaan, pedoman, program, dan layanan yang diperlukan memastikan bahwa kebutuhan perempuan dan Anak-anak diakomodasi dengan baik untuk itu dan partisipasi

NO	Judul dan nama Peneliti	Jenis penelitian dan alat analisa	Hasil
			perempuan sama di semua lapisan masyarakat.
3.	Peran UN Women dalam mempengaruhi kebijakan pemerintahan India terkait kekerasan terhadap perempuan pada	Kualitatif, Pendekatan: Manajerial (management approach) dan normatif (normative approach) tahun 2011-2015 Oleh: sabilina mareta	Kesetaraan gender merupakan isu global dan internasional. India adalah salah satu negara di mana kesenjangan gender tahunan antara 2016 dan 2021 cukup tinggi, yang tidak signifikan. Dan India adalah negara Asia Selatan dengan kesenjangan gender yang sangat besar. Faktor penyebabnya meliputi masalah keluarga, sosial, ras, perkawinan, ekonomi, agama dan budaya, serta kesadaran individu yang timbul dari diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan dan prasangka kasta. Nilai masyarakat India terhadap kedudukan perempuan disebut dengan asas Pativrata atau yang disebut asas Pativrata dalam budaya patriarki. Melalui hal tersebut, UN Women sebagai organisasi internasional PBB yang menaungi isu-isu perempuan berupaya mengatasi permasalahan yang mengancam perempuan di India.
4.	Gender Equality in South Asia Problems, Prospects and Pathways” Pongo Abell Di Sumatera. Oleh: Glenda strachan, arosha adikarim dan pavitha kailasapathy	kualitatif pendekatan: deskriptif	Pembela kesetaraan gender telah menjadi kenyataan yang diakui dan diterima di seluruh dunia. Isu kesetaraan juga telah diidentifikasi sebagai isu penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Bahkan, mencapai kesetaraan gender tidak hanya dilihat sebagai tujuan tetapi juga sebagai katalisator dan syarat yang diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Kajian ini bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan menggunakan tiga indikator Partisipasi dalam Pendidikan dasar, menengah dan tinggi, ketenagakerjaan dan pembuatan kebijakan dengan menggunakan sumber data sekunder yang berharga.

NO	Judul dan nama Peneliti	Jenis penelitian dan alat analisa	Hasil
5.	Peran UNICEF dalam mengatasi diSkriminasi gender di India pada 2014-2018. Oleh: Marthadyta	Kualitatif pendekatan: deskriptif	Kesetaraan gender juga telah diidentifikasi sebagai isu penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Bahkan, mencapai kesetaraan gender tidak hanya dilihat sebagai tujuan tetapi juga sebagai katalisator dan syarat yang diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah menggunakan tiga indikator untuk menilai sejauh mana kesetaraan gender telah tercapai dan peran perempuan telah diberdayakan Partisipasi dalam pendidikan dasar, menengah dan tinggi, pekerjaan dan pengambilan keputusan menggunakan sumber data sekunder yang berharga.

1.5 Teori/ konsep

1.5.1 Konsep International Organization

Organisasi internasional adalah lembaga yang didirikan atas dasar partisipasi sukarela dari beberapa negara, yang memiliki tujuan utama untuk membina perdamaian dunia serta mengatur hubungan antarnegara secara terstruktur dan harmonis dalam konteks tata kelola internasional. Salah satu kajian hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan pelaku dalam hubungan internasional. Menurut Clive Archer dalam karya monumentalnya *International Organizations*, istilah "organisasi internasional" merupakan gabungan dari dua konsep, yaitu "organisasi" dan "internasional." Kata "internasional" sendiri memiliki beberapa pengertian. Pertama, secara bilateral antar pemerintah, yang merujuk pada hubungan antara negara-negara berdaulat atau perwakilan resmi mereka. Kedua, aktivitas yang melibatkan individu dan kelompok lintas negara,

termasuk juga interaksi antar pemerintah yang lebih luas, yang dikenal sebagai hubungan transnasional. Ketiga, interaksi yang terjadi antara berbagai lembaga pemerintahan dalam suatu negara dengan lembaga serupa di negara lain, seperti contohnya antara kementerian kesehatan atau badan intelijen, yang berjalan tanpa melewati jalur kebijakan luar negeri resmi; bentuk hubungan ini disebut trans-pemerintahan. Ketiga jenis hubungan tersebut secara keseluruhan menjadi bagian integral dari ruang lingkup hubungan internasional.

Sebuah organisasi hanya dapat dikategorikan sebagai organisasi internasional apabila memenuhi beberapa persyaratan yang telah dijelaskan oleh Clive Archer. Organisasi tersebut terbentuk berdasarkan kesepakatan antara para anggotanya, yang bisa berupa pemerintah maupun entitas non-pemerintah dari dua atau lebih negara berdaulat, dengan tujuan utama untuk mengejar kepentingan bersama di antara anggota tersebut. Tujuan yang dianut organisasi harus bersifat internasional dan mencerminkan kepentingan lintas negara.

Selanjutnya, organisasi internasional wajib memiliki keanggotaan yang memberi hak suara kepada setiap anggotanya, sehingga proses pengambilan keputusan dapat berlangsung secara demokratis. Pendiannya harus didasarkan pada dokumen resmi berupa anggaran dasar yang mengatur tata kelola serta mekanisme kerja organisasi. Keberadaan kantor pusat (headquarter) yang berfungsi sebagai pusat koordinasi juga menjadi elemen penting guna memastikan kelangsungan dan keberlangsungan aktivitas organisasi. Sumber pendanaan sebuah organisasi harus berasal dari kontribusi para anggotanya yang terdiri dari berbagai negara atau bangsa. Selain itu, organisasi tersebut harus memiliki status

kemandirian (independen) dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya. Organisasi yang telah mengalami masa tidak aktif selama lebih dari lima tahun tidak lagi diakui sebagai entitas yang sah atau beroperasi secara resmi.

Organisasi internasional memegang peranan krusial dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh negara-negara anggotanya. Peran tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

1. Sebagai alat atau sarana, organisasi internasional dimanfaatkan oleh negara-negara anggotanya untuk mewujudkan berbagai tujuan khusus yang diselaraskan dengan kebijakan politik luar negeri masing-masing negara.
2. Sebagai suatu wadah pertemuan, organisasi internasional berfungsi sebagai forum bagi para anggotanya untuk mendiskusikan dan menelaah berbagai persoalan yang tengah dihadapi bersama. Tidak jarang, negara-negara memanfaatkan organisasi ini sebagai platform untuk mengangkat isu-isu yang terjadi dalam wilayah negaranya maupun di negara lain, dengan tujuan menarik perhatian komunitas internasional. Melalui mekanisme dialog dan negosiasi tersebut, anggota organisasi dapat mencari solusi kolektif demi penyelesaian permasalahan yang bersifat lintas batas serta memperkuat kerjasama dalam menghadapi tantangan global.
3. Sebagai entitas yang bersifat mandiri, organisasi internasional memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan dan mengambil keputusan secara otonom tanpa dipengaruhi oleh campur tangan dari pihak eksternal. Organisasi tersebut mampu melaksanakan program serta kebijakannya

secara independen, tanpa adanya tekanan atau intervensi dari kekuatan luar yang dapat mengganggu proses pengambilan keputusan internal.

Pada hakekatnya peran organisasi internasional diatas menunjukkan bahwa organisasi internasional memang dibutuhkan dalam konteks hubungan internasional, guna mencapai kepentingan nasional sekaligus menyelesaikan berbagai masalah global yang kompleks dan belum tuntas, terutama seiring dengan pesatnya perkembangan globalisasi, diperlukan kolaborasi lintas sektor. Isu-isu sosial, ekonomi, kesehatan, budaya, hak asasi manusia, perdagangan manusia, dan lain sebagainya tidak dapat diatasi hanya oleh intervensi pemerintah tunggal. Oleh karena itu, kerjasama yang melibatkan beragam aktor dari berbagai kalangan melalui organisasi internasional menjadi sangat penting sebagai wadah sinergi untuk menghadapi tantangan tersebut secara komprehensif dan efektif.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam studi riset ini, digunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara rinci dan akurat suatu kejadian atau kondisi yang ada. Secara teknis, pendekatan tersebut dipahami sebagai metode penelitian yang berfokus pada pemaparan karakteristik fenomena ataupun situasi secara komprehensif. Paradigma ini mencakup serangkaian studi yang berupaya menjawab pertanyaan mengenai "bagaimana" suatu fenomena berlangsung. Oleh karena itu, model penelitian jenis ini sangat tepat diterapkan untuk menggambarkan

proses atau mekanisme yang terkait dengan persoalan-persoalan yang sedang atau telah terjadi pada masa kini.¹²

1.6.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pengolahan data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, kemudian ditunjang oleh data sekunder yang dikumpulkan melalui kajian pustaka. Data sekunder ini berasal dari literatur yang relevan sebagai dasar penguatan teori terkait isu yang dibahas dalam penelitian. Pendekatan kualitatif yang diterapkan bertujuan untuk menyajikan gambaran sistematis terhadap fenomena yang ada tanpa mengandalkan pengolahan statistik kuantitatif.

Langkah awal dalam metode ini adalah proses pengumpulan, pengelompokan, serta penyaringan data secara cermat sesuai dengan fokus penelitian. Dalam kerangka analisis kualitatif, strategi utama yang diadopsi adalah induktif, yang mengutamakan pengorganisasian dan pengolahan data secara menyeluruh dan berurutan dari awal hingga akhir penelitian. Proses ini melibatkan pengembangan konsep dan temuan berdasarkan fakta empiris yang ditemukan, sehingga memungkinkan perumusan generalisasi yang muncul secara alami dari data yang dianalisis. Pendekatan induktif ini berbeda dengan pendekatan deduktif yang lebih mengedepankan pengujian teori yang telah ada. Dalam penelitian ini, fokus lebih pada memahami secara mendalam kondisi objek studi dengan cara mengumpulkan fakta-fakta secara kronologis dan menginterpretasikan data secara

¹² W. Gulo, Metodologi Penelitian, Jakarta: Grasindo, 2002, h. 19-20

holistik untuk menemukan pola-pola dan makna yang relevan dengan topik yang diteliti.

1.6.3 Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui kajian pustaka (literature review), yaitu proses pengumpulan berbagai sumber data dan informasi yang mencakup berbagai karya ilmiah seperti buku, artikel jurnal, tesis, serta sumber elektronik. Selain itu, data penelitian juga diambil dari repository digital seperti ePrints Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga maupun institusi yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk menyediakan landasan teoritis yang kuat sekaligus menyajikan informasi yang relevan sebagai dasar analisis dalam studi.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.4.1 Batasan Materi

Penulis memberikan batasan materi yang berfokus untuk membahas tentang Peran UN Women dalam Menangani permasalahan kesetaraan gender terhadap perempuan di India 2016-2021.

1.6.4.2 Batasan Waktu

Periode penelitian ini adalah 2016-2021, di mana pada tahun 2016, UN Women mulai memperluas program bantuannya dengan meluncurkan berbagai pelatihan dan inisiatif baru untuk meningkatkan kesetaraan gender di India. Salah satu program utama adalah Jugnu Clubs, yang didirikan di perkebunan teh di Assam untuk memberdayakan perempuan dan mencegah kekerasan berbasis gender. Selain itu, program Second Chance Education and Vocational Learning (SCE)

diluncurkan untuk memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada perempuan yang sebelumnya tidak memiliki akses, memungkinkan mereka untuk kembali ke pendidikan formal dan memperoleh keterampilan kewirausahaan serta akses ke peluang kerja dan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana peran UN Women dalam implementasi CEDAW untuk mengatasi kesetaraan gender di India.

1.7 Argumen Pokok

UN Women hadir di berbagai negara termasuk India. UN Women bekerjasama dengan pemerintah India dan masyarakat sipil untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini UN Women merupakan salah satu organisasi internasional. Sebagai organisasi internasional UN Women memiliki status sebagai arena dan aktor independen yang digunakan untuk menyelesaikan masalah serta mencapai tujuan politik luar negeri suatu negara.

UN Women berperan sebagai instrumen penting yang dimanfaatkan oleh pemerintah India dalam mengatasi isu ketidaksetaraan gender yang dialami perempuan. Organisasi ini secara aktif melaksanakan berbagai program yang dirancang khusus untuk memberdayakan perempuan dan mendorong kesetaraan di berbagai bidang, seperti peningkatan partisipasi perempuan dalam sistem pemerintahan, akses terhadap pekerjaan yang layak, dan penghapusan kekerasan berbasis gender. Program-program ini didukung oleh kerja sama erat UN Women dengan pemerintah India, lembaga PBB lainnya, sektor swasta, serta organisasi masyarakat sipil untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang responsif gender dan menjawab kebutuhan perempuan di lapangan secara efektif.

Sebagai arena, UN Women berfungsi sebagai platform bagi India untuk menyampaikan berbagai permasalahan gender yang dihadapi di forum internasional. Melalui keikutsertaan dalam berbagai konferensi dan pertemuan global yang diinisiasi atau difasilitasi oleh UN Women, pemerintah India dapat memperoleh dukungan dari komunitas internasional berupa komitmen kebijakan, sumber daya, dan advokasi yang meningkatkan posisi perempuan di India. Forum-forum ini juga menjadi tempat penting bagi India untuk berbagi pengalaman dan belajar dari praktik terbaik negara lain dalam upaya pemberdayaan perempuan dan penghapusan diskriminasi.

Dalam hal aktor independen, UN Women menunjukkan kapasitasnya untuk melakukan intervensi secara mandiri di India dalam menangani isu kesetaraan gender. Organisasi ini memiliki mandat dan landasan hukum yang jelas untuk menjalankan program-program yang spesifik di bidang tersebut. Keberadaan struktur manajemen dan mekanisme pelaporan yang terlembaga memperlihatkan bahwa UN Women tidak hanya bertindak sebagai fasilitator atau mitra pemerintah semata, tetapi juga sebagai aktor yang dapat menginisiasi, mengelola, dan mengevaluasi berbagai inisiatif pemberdayaan perempuan di India secara otonom.

1.8 Sistematika Penulisan

<p>BAB I PENDAHULUAN</p>	<p>1.1 Latar Belakang</p> <p>1.2 Rumusan Masalah</p> <p>1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian</p> <p>1.3.1 Tujuan Penelitian</p> <p>1.3.2 Manfaat Penelitian</p> <p>1.4 Penelitian Terdahulu</p> <p>1.4.1 Tabel Posisi Penelitian</p> <p>1.5 Teori/ konsep</p> <p>1.5.1 Konsep Organisasi Internasional</p> <p>1.6 Metode Penelitian</p> <p>1.6.1 Jenis Penelitian</p> <p>1.6.2 Metode Analisis</p> <p>1.6.3 Tingkat Analisis</p> <p>1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian</p> <p>1.6.5.1 Batasan Materi</p> <p>1.6.5.2 Batasan Waktu</p> <p>1.6.5 Teknik dan Pengumpulan data</p> <p>1.7 Argumen Pokok</p> <p>1.8 Sistematika Penulisan</p>
<p>BAB II Gambaran umum UN Women dan Permasalahan Kesenjangan Gender di India</p>	<p>2.1 Gambaran UN Women</p> <p>2.2 Permasalahan Kesenjangan Gender di India</p> <p>2.2.1 Kondisi Perempuan di India</p> <p>2.2.2 Kebijakan India terhadap Perempuan</p> <p>2.3 Kontribusi UN Women dalam Menangani Permasalahan Kesenjangan gender di India</p> <p>2.4 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)</p>

<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">Analisis Peran UN Women dalam Menangani Kesetaraan Gender Terhadap Perempuan DI india</p>	<p>1.3 Peran UN Women dalam Menangani Masalah Kesetaraan Gender</p> <p>1.3.1 UN Women sebagai Arena</p> <p>1.3.2 Peran UN Women sebagai Aktor Independen</p> <p>3.2 Upaya UN Women dalam Menangani Masalah Kesetaraan Gender</p> <p>3.2.1 Tantangan UN Women dalam Menangani Permasalahan Kesetaraan Gender</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">PENUTUP</p>	<p>4.1 Kesimpulan</p> <p>4.2 Saran</p>

